

RUTINKAN PENGAWASAN DI PINTU MASUK YOGYA

Bus Pariwisata Wajib Penuhi Standar Keselamatan

YOGYA (KR) - Memasuki musim libur sekolah, Kota Yogya diprediksi bakal kerap dilewati armada bus pariwisata. Setiap armada pengangkut penumpang maupun barang pun wajib memenuhi standar keselamatan. Dinas Perhubungan Kota Yogya bahkan mulai merutinkan pengawasan di pintu masuk Yogya.

Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogya Hary Purwanto, mengatakan pemilihan angkutan pariwisata yang berkeselamatan itu sebagai upaya meningkatkan keselamatan penumpang. Apalagi beberapa waktu belakangan ini cukup banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan wisata khususnya bus pariwisata di beberapa daerah.

"Dengan masa liburan ini Dinas Perhubungan Kota Yogya merefresh lagi atau istilahnya meningkatkan kembali. Kita imbau kepada para pelaku kegiatan wisata baik itu jasa angkutan wisata, para penggunanya seperti sekolah dan masyarakat untuk bisa memilih angkutan wisata yang berkeselamatan," katanya, Kamis (27/6).

Selama ini juga sudah ada panduan terkait angkutan berkeselamatan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2019 maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang. Dinas Perhubungan Kota Yogya juga sudah mengeluarkan Surat Edaran nomor 500.11.32.1/1684 terkait pemilihan angkutan pariwisata.

Dalam edaran itu ada tiga hal yang harus dipastikan dalam memilih bus pariwisata yang berkeselamatan yaitu memastikan perusahaan angkutan memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang yang sesuai dan berlaku, memastikan bus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Selain itu

memastikan pengemudi memiliki surat izin mengemudi (SIM) BI atau BII umum yang berlaku dan sesuai dengan surat tugas dari perusahaan angkutan umum. "Yang perlu kita pastikan yaitu terkait dengan perizinannya seperti izin operasi, terkait kondisi kendaraan dibuktikan dengan dokumen uji KIR. Kita pastikan juga pengemudinya SIM-nya untuk angkutan umum bus. Ini yang betul-betul kita pastikan sebagai upaya meningkatkan keselamatan," terangnya.

Izin penyelenggaraan angkutan itu dapat dicek di Kartu Pengawasan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan atau melalui situs <https://spionam/depweb.go.id>. Untuk persyaratan teknis dan laik jalan dapat diperiksa lewat bukti lulus uji elektronik, kartu uji dan sertifikat uji atau melalui aplikasi Mitra Darat yang bisa diunduh melalui smartphone. "Jadi kami imbau masyarakat atau sekolah yang di masa liburan ini akan menggunakan bus pariwisata, betul-betul memastikan kondisi fisiknya laik

jalan," tambah Hary.

Menurutnya, beberapa waktu lalu Dinas Perhubungan Kota Yogya dan DIY sudah mengimbau kepada para pelaku operator bus pariwisata untuk memenuhi standar kelaikan jalan. Menurutnya di Kota Yogya sebagian besar bus pariwisata sudah memenuhi laik jalan. Kasus kecelakaan bus pariwisata di Kota Yogya karena tidak laik jalan selama ini juga tidak ditemukan. Meski demikian pengawasan tetap perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.

Hary menyebut pada akhir pekan jumlah bus pariwisata yang masuk di Kota Yogya berkisar 600 bus hingga 700 bus. Sedangkan pada masa liburan panjang seperti saat libur sekolah, jumlah bus trennya merata setiap harinya. "Kami juga lakukan operasi gabungan yang salah satunya melakukan pengecekan bus-bus pariwisata yang melintas apakah memenuhi terkait kelaikan jalan. Baik itu dokumen perjalanan maupun dokumen uji berkala," paparnya. (Dhi)-f

RSUP Dr Sardjito Buka Layanan Rawat Jalan Full Day



KR-Istimewa

Eniarti (tengah) menyampaikan keterangan pers.

YOGYA (KR) - RSUP Dr Sardjito Yogyakarta kembali mengembangkan inovasi untuk memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Per 1 Juli 2024, akan dibuka layanan rawat jalan full day dengan membuka pendaftaran periksa secara online dan pelayanan dibuka mulai pukul 07.30 WIB sampai selesai pasien tertangani sesuai jadwal layanan dokter sore berakhir.

Direktur Utama RSUP Dr Sardjito, dr Eniarti MSc SpKJ MMR menjelaskan, melalui layanan rawat jalan full day, pasien yang datang dan sudah terdaftar secara online, akan dilayani sampai dengan antrean habis diperiksa oleh tim medis. Pelayanan ini diberikan untuk pasien yang telah melakukan pendaftaran secara online melalui link <https://pendaftaran.sardjito.co.id> atau dapat pula melakukan download aplikasi di playstore android Klik Sardjito Aja.

Demikian pula jika pasien datang secara onsite dan saat pelayanan dokter masih berlangsung maka tetap dapat dilayani sesuai kuota saat itu. "Diharapkan melalui layanan full day tersebut, akan memberikan kemudahan akses bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang lebih baik," kata Eniarti saat jumpa pers di RSUP Dr Sardjito, Kamis (27/6).

Menurutnya, layanan rawat jalan full day yang dibuka tersebut, ditujukan untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di RSUP Dr Sardjito. Pasien akan dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan saat mengakses rawat jalan, layanan penunjang seperti laboratorium klinik dan pemeriksaan radiologi, layanan kanker tulip, Layanan Medical Check Up (MCU) dan Pemeriksaan Eksekutif Amarta. (Dev)-f

BARU EMPAT PERSEN WARGA TERINTEGRASI IKD

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Perlu Digenjot

YOGYA (KR) - Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya untuk menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) cukup maksimal. Namun upaya tersebut sangat membutuhkan dukungan masyarakat terutama wajib KTP untuk berperan aktif melakukan aktivasi.

Hingga pertengahan bulan ini total baru empat persen warga wajib KTP yang sudah terintegrasi atau berhasil melakukan aktivasi.

"Data per 15 Juni 2024 sudah ada 11.875 warga yang sudah aktivasi IKD. Itu baru setara dengan sekitar empat persen dari wajib KTP Kota Yogya," ungkap Kepala Dindikcapil Kota Yogya Septi Sri Rejeki, Kamis (27/6).

Sebelumnya Dindikcapil Kota Yogya sempat mencatat capaian aktivasi IKD sudah menembus angka lebih dari 11 persen. Akan tetapi Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri) merubah rumus perhitungan yang tidak lagi mempertimbangkan target di tiap daerah sehingga capaian di Kota Yogya turut berubah.

Septi menjelaskan kepemilikan IKD akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Terutama yang memiliki telepon genggam dengan spesifikasi mendukung serta mobilitasnya yang cukup tinggi. Sebagian masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD itu biasanya penduduk Kota Yogya tapi bertempat tinggal di luar daerah.

Di samping itu ada masyarakat yang telepon selulernya tidak mendukung untuk aplikasi IKD. Termasuk orangtua atau lansia yang tidak paham dengan teknologi sehingga merepotkan dirinya sendiri jika menggunakan IKD.

"Kepada masyarakat yang punya smartphone yang mendukung, aktivitas dan mobilitasnya tinggi,

silakan untuk segera melakukan aktivasi IKD," ajaknya.

Untuk memberikan pelayanan aktivasi IKD, sejumlah langkah yang dilakukan ialah layanan reguler di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Kantor Dindikcapil Kota Yogya, jemput bola ke kementren, sekolah serta setiap kegiatan masyarakat hingga aktivasi jarak jauh menggunakan aplikasi zoom meeting.

Dicontohkannya, pernah ada warga Kota Yogya yang kehilangan KTP elektronik saat hendak melakukan boarding di Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Oleh pihak bandara kemudian difasilitasi untuk aktivasi IKD melalui zoom meeting bersama petugas Dindikcapil Kota Yogya.

"Permasalahan itu akhirnya bisa teratasi. Itu salah satu manfaat memiliki IKD yang sudah aktif. Jadi tidak perlu kerepotan ketika hendak mengakses layanan

publik yang sudah terintegrasi elektronik," urainya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Teguh Setyabudi, mengatakan pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan percepatan IKD. Pihaknya menegaskan IKD bukan semata-mata KTP digital tapi identitas digital menyangkut berbagai layanan dokumen yang lain. Sehingga jajarannya berharap agar Pemkot Yogya bisa terus menggenjot

aktivasi IKD bagi warga yang sudah wajib KTP.

Hingga saat ini IKD sudah terintegrasi dengan sembilan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Masing-masing ialah layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian. (Dhi)-f

BERI KEMUDAHAN LAYANAN DI RANAH DIGITAL

Implementasi Program Smart City Butuh Partisipasi Masyarakat

YOGYA (KR) - Program smart city yang didengungkan pemerintah membutuhkan peran atau partisipasi masyarakat. Terutama dalam hal implementasi untuk memberikan kemudahan layanan di ranah digital. Harapannya mampu terwujud ekosistem atau iklim yang semakin kondusif di masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogya Trihastono, memaparkan implementasi smart city tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan Kota Yogya termasuk partisipasi langsung dari masyarakat.

"Kami secara rutin melakukan rapat dengar pendapat umum ataupun public hearing yang melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan serta gagasan untuk pengembangan smart city juga pembangunan Kota Yogya. Sejauh ini masyarakat juga bisa merasakan secara langsung bagian dari implementasi smart city," paparnya, Kamis (27/6).

Salah satu implementasi program smart city yang digulirkan oleh Pemkot Yogya, imbuhan Tri Hastono, ialah melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS yang menyediakan 227 layanan. Dari ratusan layanan itu, terdapat 162 layanan di antaranya merupakan layanan publik yang dapat diakses untuk kepentingan masyarakat. Mulai dari pengaduan, kegawatdaruratan hingga kebutuhan administrasi kependudukan dan perpajakan.

Pihaknya juga menyampaikan, kegiatan perekonomian masyarakat Kota Yogya terus didorong untuk bertransformasi pada smart economy. Seperti hal-

nya kegiatan perdagangan di pasar rakyat yang sudah menggunakan metode pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. Pemkot juga mengembangkan pembayaran non tunai untuk pembayaran pajak dan retribusi dengan QRIS dinamis serta virtual account (VA).

"Selain para pedagang di pasar rakyat sudah mulai bertransformasi dengan pembayaran non tunai melalui QRIS, pada aplikasi JSS juga disediakan menu Nglaris dan Dodolan di mana masyarakat bisa memasarkan produknya secara daring bagi perangkat daerah juga masyarakat umum," terangnya.

Oleh karena itu, berbagai program smart city yang sudah diberikan harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat. Terutama dalam memanfaatkan layanan dan terus bertransformasi seiring perkembangan teknologi. Apalagi setiap layanan tersebut dalam pelaksanaannya didukung dalam regulasi berupa peraturan walikota dan keputusan walikota, serta kolaborasi, koordinasi dan sosialisasi lintas sektor termasuk melibatkan partisipasi masyarakat.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, juga mengatakan jajarannya berkomitmen mewujudkan visi smart city dalam pembangunan Kota Yogya yang implementasinya mencakup pada smart branding, economy, living, society, governance dan environment. "Pemkot Yogya memiliki visi untuk menjadi kota cerdas dalam pembangunan Kota Yogya melalui layanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi untuk keberdayaan masyarakat," katanya. (Dhi)-f

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.